Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 17136 - 17143

Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bagi Pembangunan Kota Hijau (*Green City*) Di Kota Kupang

Carin Theresa Patut [1*], I Putu Y. B. Pradana[2], Aspri B. Oktavianto[3], Theny I. B. K. Pah[4]
[1,2,3,4] Ilmu Administrasi Publik, Universitas Nusa Cendana
Email: patutcarin@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan kota yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup, salah satunya melalui penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola ruang terbuka hijau dalam mendukung pembangunan kota hijau di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perspektif collaborative governance menurut (Thomson&Perry, 2007) yang meliputi dimensi tata kelola, administratif, otonomi, kesalingtergantungan, serta kepercayaan dan timbal balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola RTH di Kota Kupang belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tercapainya target 30% RTH sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antaraktor, peningkatan pengawasan kebijakan penataan ruang, serta pelibatan masyarakat secara aktif agar pembangunan kota hijau di Kota Kupang dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Ruang Terbuka Hijau, Kota Hijau, Administrasi Publik.

ABSTRACT

Evaluation of a community economic empowerment program is a systematic process to assess Sustainable urban development requires a balance between physical development and environmental preservation, one of which is achieved through the provision and governance of green open spaces (GOS). This study aims to analyze the governance of green open spaces in supporting green city development in Kupang City. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis is based on the collaborative governance framework proposed by Thomson and Perry, which includes governance, administrative, autonomy, mutual dependence, and trust dimensions. The findings indicate that GOS governance in Kupang City has not been optimal, as reflected by the failure to achieve the 30% GOS target mandated by national regulations, weak inter-agency coordination, limited budget allocation, and low community participation. Strengthening multi-actor collaboration, improving policy supervision, and increasing public involvement are therefore necessary to achieve sustainable green city development.

Keywords: *Governance, Green Open Space, Green City, Public Administration.*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan kota yang pesat selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya penurunan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH). Kota sebagai pusat pertumbuhan dan aktivitas sosial-ekonomi mengalami tekanan akibat pertambahan jumlah penduduk dan perubahan dinamika perkotaan yang mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya tekanan

terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penyediaan dan perlindungan ruang terbuka publik menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius (Hastuti, 2018).

Salah satu dampak paling nyata dari dinamika pembangunan perkotaan adalah berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut, banyak lahan-lahan kosong yang dinilai kurang produktif dialihfungsikan menjadi wilayah pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan lain sebagainya. Akibatnya, lahan kosong yang seharusnya dapat dijadikan lahan terbuka hijau justru padat dengan gedung-gedung perkantoran dan pemukiman (Dinanti, 2021).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa proporsi RTH di wilayah perkotaan minimal sebesar 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan RTH merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun, 2007).

Dalam kerangka pembangunan kota hijau (*green city*), RTH menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan lingkungan perkotaan. Konsep kota hijau menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan RTH tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat dan sektor swasta, melalui mekanisme tata kelola yang kolaboratif.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan RTH. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta data dari pemerintah daerah, luas RTH di Kota Kupang hingga saat ini masih berada di bawah ketentuan minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ketersediaan lahan akibat tekanan pembangunan fisik, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan ruang, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan RTH juga masih menunjukkan adanya tumpang tindih peran dan keterbatasan sinergi.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa isu RTH di Kota Kupang bukan semata-mata persoalan teknis penataan ruang, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan tata kelola yang mampu menjembatani kepentingan berbagai aktor dan mendorong terciptanya kerja sama yang efektif. Pendekatan *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh (Thomson&Perry, 2007) menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika pengelolaan RTH, karena menekankan pentingnya tata kelola bersama yang didasarkan pada interaksi, saling ketergantungan, dan kepercayaan antaraktor.

Penelitian ini berfokus pada analisis tata kelola ruang terbuka hijau di Kota Kupang dalam mendukung pembangunan kota hijau melalui lima dimensi utama *collaborative governance*, yaitu dimensi tata kelola (*governance*), dimensi administratif, dimensi otonomi, dimensi kesalingtergantungan, serta dimensi kepercayaan dan timbal balik. Analisis terhadap kelima dimensi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting pengelolaan RTH di Kota Kupang sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam mewujudkan pembangunan kota hijau yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) dalam mendukung pembangunan kota hijau di Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika kebijakan, proses pengelolaan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan RTH berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh para aktor dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

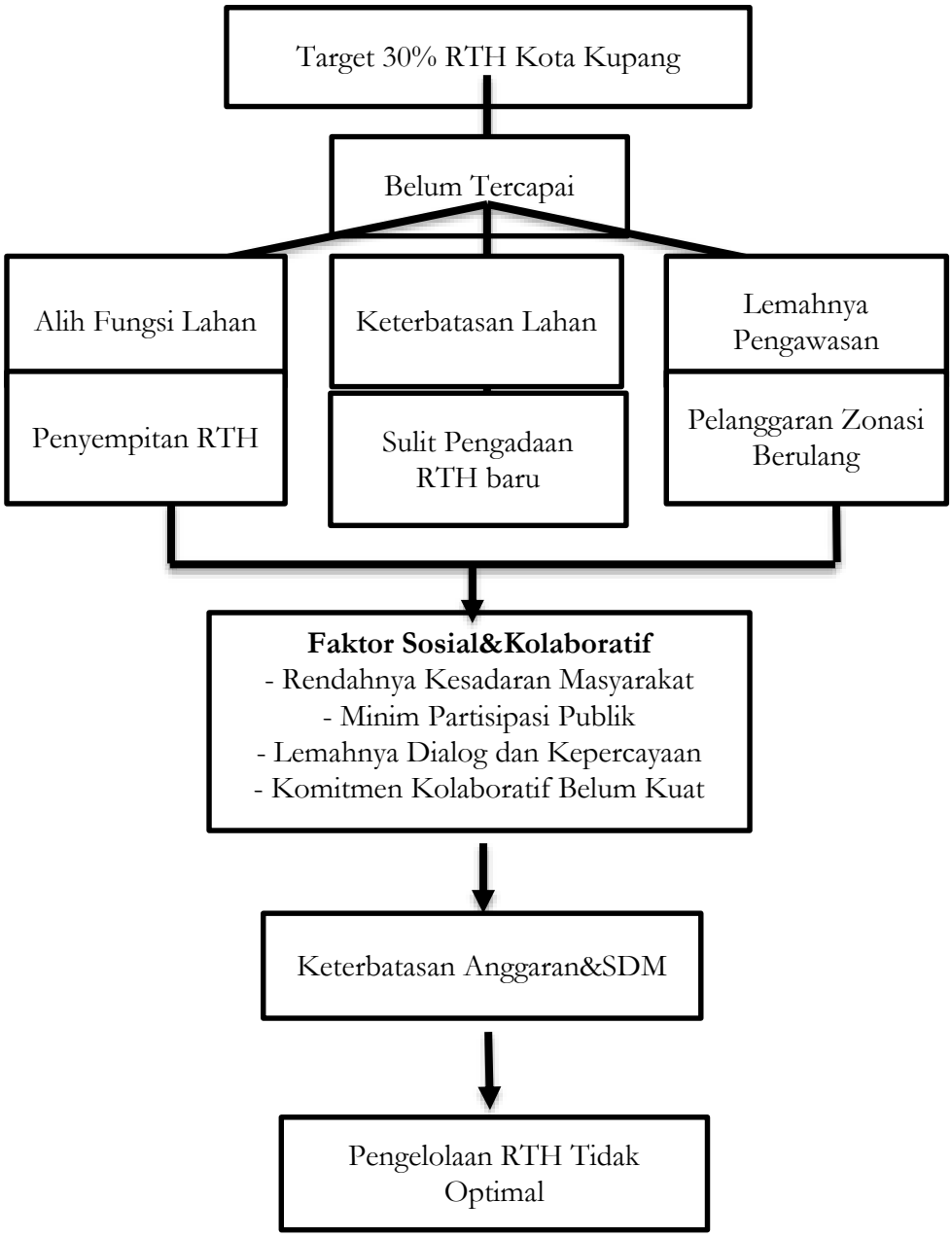
Penelitian dilaksanakan di Kota Kupang dengan fokus pada kebijakan dan implementasi pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, masyarakat, serta pihak pendukung lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan RTH. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dengan mengacu pada model (Miles & Saldana, 2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Kupang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan kota hijau. Secara umum, tata kelola RTH di Kota Kupang melibatkan berbagai aktor, terutama pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta masyarakat sebagai pengguna dan penjaga keberlanjutan RTH. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola RTH di Kota Kupang masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain keterbatasan luas RTH, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Untuk memahami lebih jauh dinamika tata kelola tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *collaborative governance* sebagai alat analisis. dari (Thomson&Perry, 2007).

Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH tidak hanya bergantung pada satu aktor, melainkan merupakan hasil interaksi dan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak pendukung lainnya. Lima dimensi utama, yaitu dimensi tata kelola, dimensi administratif, dimensi otonomi, dimensi kesalingtergantungan, serta dimensi kepercayaan dan timbal balik, saling berhubungan dan memengaruhi efektivitas pengelolaan RTH dalam mendukung pembangunan kota hijau di Kota Kupang.

Gambar 1. Bagan Faktor Penyebab RTH di Kota Kupang Tidak Mencapai Target 30%



Sumber: Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dipahami bahwa belum tercapainya target 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kupang merupakan hasil dari keterkaitan antar berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor alih fungsi lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan menjadi pemicu utama

penyempitan RTH, yang kemudian diperkuat oleh lemahnya pengawasan serta penegakan aturan tata ruang. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran zonasi terus berulang dan mengurangi luasan RTH secara signifikan.

1. Dimensi Tata Kelola

Dimensi tata kelola dalam pengelolaan RTH di Kota Kupang berkaitan dengan kerangka kebijakan, aturan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar regulasi yang mengatur pengelolaan RTH, baik melalui kebijakan penataan ruang maupun peraturan daerah terkait lingkungan hidup. Akan tetapi implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.

Salah satu permasalahan utama pada dimensi ini adalah lemahnya konsistensi antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan. Alih fungsi lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai RTH masih terjadi, yang menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan RTH masih cenderung bersifat top-down, sehingga ruang partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan belum sepenuhnya terakomodasi.

Dalam perspektif *collaborative governance*, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dimensi tata kelola di Kota Kupang masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas kebijakan agar pengelolaan RTH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Dimensi Administratif

Dimensi administratif berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, serta kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Kupang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan berbeda, seperti bidang penataan ruang, lingkungan hidup, dan perencanaan pembangunan.

Meskipun secara struktural pembagian kewenangan telah ditetapkan, koordinasi antar-OPD belum berjalan secara optimal. Terdapat tumpang tindih peran serta keterbatasan sinkronisasi program yang berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan RTH. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH secara berkelanjutan.

Dalam konteks teori (Thomson & Perry, 2007), lemahnya dimensi administratif dapat menghambat proses kolaborasi karena struktur dan mekanisme pendukung belum sepenuhnya mampu memfasilitasi kerja sama lintas sektor secara efektif.

3. Dimensi Otonomi

Dimensi otonomi menggambarkan sejauh mana masing-masing aktor memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya tanpa kehilangan arah pada tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menjadi aktor dominan dalam pengelolaan RTH di Kota Kupang, sementara peran masyarakat dan pihak non-pemerintah cenderung bersifat pelengkap.

Masyarakat pada umumnya dilibatkan pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan RTH, namun keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi aktor non-pemerintah belum sepenuhnya berkembang secara seimbang. Padahal, dalam kerangka *collaborative governance*, setiap aktor seharusnya memiliki ruang yang proporsional untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama.

Kurangnya ruang otonomi bagi masyarakat berpotensi mengurangi rasa memiliki terhadap RTH, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan pengelolaannya.

4. Dimensi Kesalingtergantungan

Dimensi kesalingtergantungan menunjukkan adanya kebutuhan dan ketergantungan antaraktor dalam mencapai tujuan pengelolaan RTH. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak pendukung lainnya saling membutuhkan dalam pengelolaan RTH di Kota Kupang. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH, sementara masyarakat membutuhkan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah. Akan tetapi, hubungan kesalingtergantungan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi yang terbangun masih bersifat situasional dan belum terinstitusionalisasi dalam bentuk kerja sama yang berkelanjutan. Kurangnya forum komunikasi dan koordinasi lintas aktor menjadi salah satu faktor yang menghambat penguatan dimensi ini.

Dalam perspektif *collaborative governance*, kesalingtergantungan yang tidak dikelola dengan baik dapat melemahkan efektivitas kolaborasi dan mengurangi capaian tujuan pembangunan kota hijau.

5. Dimensi Kepercayaan dan Timbal Balik

Dimensi kepercayaan dan timbal balik merupakan fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antaraktor dalam pengelolaan RTH di Kota Kupang masih bervariasi. Sebagian masyarakat menunjukkan kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan RTH, namun di sisi lain masih terdapat keraguan terkait konsistensi kebijakan dan keberlanjutan pengelolaan RTH. Kurangnya komunikasi yang intensif dan transparan antara pemerintah dan masyarakat berdampak pada rendahnya mekanisme timbal balik yang saling menguntungkan. Partisipasi masyarakat sering kali belum direspons secara optimal oleh pemerintah, sehingga kolaborasi yang terbangun belum sepenuhnya menciptakan hubungan yang setara.

Menurut (Thomson&Perry, 2007), kepercayaan dan timbal balik yang kuat akan memperkuat dimensi kolaborasi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan pelibatan aktor secara konsisten menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola RTH di Kota Kupang.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Kupang dalam mendukung pembangunan kota hijau belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki kerangka kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan RTH, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan RTH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum optimalnya fungsi ekologis serta sosial RTH di wilayah perkotaan.

Selain itu, pengelolaan RTH di Kota Kupang masih menunjukkan keterbatasan dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antaraktor. Keterlibatan masyarakat dan pihak non-pemerintah cenderung belum terintegrasi secara sistematis dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga tata kelola yang terbentuk masih bersifat administratif dan sektoral. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola yang kolaboratif, integratif, dan partisipatif menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH serta mendukung terwujudnya pembangunan kota hijau yang berkelanjutan di Kota Kupang.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan RTH tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas interaksi, komitmen, dan kepercayaan antaraktor yang terlibat. Tanpa adanya sinergi yang kuat dan mekanisme kolaborasi yang terstruktur, upaya pengelolaan RTH berpotensi berjalan secara parsial dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pola kerja kolaboratif menjadi aspek krusial dalam mendorong pengelolaan RTH yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinanti, A. T. (2021). *Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2020* (Skripsi, Universitas Lampung).

http://digilib.unila.ac.id/

Hastuti. (2018). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar).

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3189-Full_Text.pdf

Matthew B. Miles A. Michael Huberman Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods*

https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf

Thomson&Perry. (2007). Conceptualizing and Measuring Collaboration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *19*(1), 23–56.

https://doi.org/10.1093/jopart/mum036

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007* tentang penataan ruang

https://peraturan.bpk.go.id/Download/29499/UU Nomor 26 Tahun 2007.pdf